

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1604/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA **BERENCANA**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organsiasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

: Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Nomor: 1856/TU.01.02/SET tanggal 15 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang

namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama

melaksanakan tugas;

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan

Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan

Pelaksana;

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : Kep.1604/KPG.04.01/MP/2022

TANGGAL: 31 JANUARI 2022

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

TENTANG : PELAKSANA DI PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	PENDIDIKAN TERAKHIR		JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
1	INDIRA BRIANTRI ASNI, S.Psi.	198106072015032002	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIAT
2	HENDRI APRIAN SETIADARMA, A.Md.	199604142020121012	Pengatur (II/c)	D3	6	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	PENGOLAH DATA	SEKRETARIAT
3	TANTRI HANDAYANI, SH	199005232020122011	Penata Muda (III/a)	S 1	6	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM	SEKSI DATA DAN INFORMASI, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
4	WIDYA PUTRI PERMATA SARI, S.STP	199407152016092001	Penata Muda TK.I (III/b)	D4	6	PENGOLAH DATA	SEKSI KETAHANAN KELUARGA, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
5	YELI MEILAWATI	198205272014102001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
6	ASEP SAEFUDIN, S.I.P.	196705211990101001	Penata TK.I (III/d)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
7	CALVARINI PAKPAHAN, A.Md	199204292020122011	Pengatur (II/c)	D3	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
8	WAHYUDIN, S.E.	197311142007011003	Penata Muda TK.I (III/b)	S 1	7	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
9	ANA MARLIANA, A.Md	199403182020122013	Pengatur (II/c)	D3	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
10	WIDA DWI ASTUTI, A.Md.Ak	199706032020122015	Pengatur (II/c)	D3	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
11	ARIP RIMBAWAN, S.E.	197909082009011001	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGELOLA GAJI	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA GAJI	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pendidikan Terakhir	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
12	VINA TRILESTARI, A.Md. Akun	198607122020122004	Pengatur (II/c)	D3	6	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
13	INTAN NURFITRIYAH	198211282014122006	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT
14	YUYUN KURNIASIH, S.STP	199201132014062001	Penata Muda TK.I (III/b)	D4	7	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT
15	SITI KOMARIAH, S.E., M.M.	197010191998032003	Penata Muda TK.I (III/b)	S2	7	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT
16	YUDI KURNIAWAN	197909082008011005	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
17	YUNI SITI NURDINIYATI, S.Psi	199006112020122016	Penata Muda (III/a)	S1	7	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	SEKSI PERBADAYAAN HUKUM, POLITIK, DAN SOSIAL PEREMPUAN, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
18	EMA EMALIA	196505251989122001	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
19	AWANG CARWAN	197006082009011004	Pengatur (II/c)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	SEKSI DATA DAN INFORMASI, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
20	YUSUP JUANDA, S.E., M.M.	197506292009011001	Penata TK.I (III/d)	S2	7	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	SEKSI DATA DAN INFORMASI, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
21	MIRA RAHMAWATI, S.Si	199703182020122020	Penata Muda (III/a)	S1	7	ANALIS KETAHANAN KELUARGA	SEKSI KETAHANAN KELUARGA, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	ANALIS KETAHANAN KELUARGA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
22	M ANDRI, S.Si.	197902152009011003	Penata TK.I (III/d)	S1	7	PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	SEKSI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
23	HENY HADIYANTI, S.Sos. M.AP	197902262014122001	Penata Muda TK.I (III/b)	S2	7	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
24	ANDRI MISGIE RADIAN, S1,	197804112009011001	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGOLAH DATA	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENGOLAH DATA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
25	YANI NURJANAH	197808202014102001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
26	LINDA MARIANA, S.I.P.	197503271998032004	Penata TK.I (III/d)	S1	7	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
27	ATIK SUPARINI, S.KM	198510272020122006	Penata Muda (III/a)	S 1	7	PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	SEKSI KELUARGA BERENCANA, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
28	DIAN NURAENI, S.K.M.	197411212007012006	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGOLAH DATA	SEKSI KELUARGA BERENCANA, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENGOLAH DATA	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
29	PAISAL MUTAKIN, S.STP	199210122016091001	Penata Muda TK.I (III/b)	D4	6	PENGOLAH DATA	SEKSI PENGASUHAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA, BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	PENGOLAH DATA	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
30	ETTY SUMINAR SETIAWATI, S.H.	196503131994022001	Penata TK.I (III/d)	S 1	7	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	SEKSI PENGASUHAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA, BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
31	RUBY WARDHANA BASSAR, S.I.P.	197005291998031002	Penata TK.I (III/d)	S1	7	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI, DAN PARTISIPASI, BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
32	YETI KUSMIATI PERMANASARI, S.E.	197304102007012008	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	PENGOLAH DATA	SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI, DAN PARTISIPASI, BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
33	PRADYNA SUHARDY, A.Md.	198407082011011001	Penata Muda (III/a)	D3	6	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN, BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	PENGELOLA DATA	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
34	FHERA ARIYANTI, S.Sos.	198009302015032001	Penata Muda TK.I (III/b)	S 1	7	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN, BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
35	RADEN WILDAN GUMILANG, S.T.	197706022009011002	Penata TK.I (III/d)	S1	7	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
36	REZA BARKAH, S.E., M.M.	197302202005011007	Penata TK.I (III/d)	S2	7	PENGOLAH DATA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
37	AGUS ROHAEDI	196908252009011002	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
38	IDA RUBIAH WIDIYATI	196509081986122001	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
39	AYI SOPARI, S.E.	196805132009011002	Pengatur (II/c)	S 1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Ν	Ю	NAMA	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Pendidikan Terakhir	_	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	Jabatan Baru	UNIT KERJA BARU
	40 H	HENI RUSTINI	196611281991032003	Penata Muda TK.I (III/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN, BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	41 H	INDAH DOANITA HASIBUAN, S.K.M., M.Kes.	198411262006042013	Penata (III/c)	S2	7	PENGOLAH DATA	SEKSI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PENYULUH KEMASYARAKATAN	SEKSI TINDAK LANJUT KASUS, UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

